

# PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

## ABSTRAK

HERLAN SUHERLAN<sup>1)</sup>

Jawa Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan semakin bertambahnya jumlah obyek wisata serta berbagai macam jenis obyek wisata seperti bangunan bersejarah. Namun potensi yang tinggi tersebut masih kurang dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan retribusi objek pariwisata Jawa Barat. Oleh karena itu perlu diadakan studi mengenai analisis pengaruh jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita terhadap pendapatan retribusi objek pariwisata di Jawa Barat agar memperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat; (2) pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat; dan (3) pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yakni suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka-angka yang di nilai dan dianalisis dengan analisis statistik. Analisis data yang dipilih adalah analisis regresi berganda panel data yang mengkombinasikan antara data *time series* dan data *cross-section* dengan program *eviews v.7*.

Belanja modal dan pendapatan asli daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar 55,49 persen dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat sedangkan sisanya sebesar 44,51 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk terus mengoptimalkan pengelolaan destinasi, sehingga mampu meningkatkan pendapatan retribusi objek pariwisata Jawa Barat.

### **Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah**

1) HERLAN SUHERLAN adalah dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung

## **A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Industri pariwisata memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional dan daya serap lapangan kerja di sektor industri pariwisata. Tingginya capaian target sektor pariwisata sepanjang tahun 2013 semakin menguatkan bahwa prospek pariwisata yang semakin besar pada 2014. Tahun 2013 sektor pariwisata meraih kunjungan 8.802.129 wisman atau tumbuh 9,42 persen dengan perolehan devisa sebesar 10,05 miliar dollar AS. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat

Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenparekraf mencatat dalam dua bulan terakhir November dan Desember 2013 kunjungan wisman mencapai rekor tertinggi masing-masing sebesar 807.422 dan 860.655 wisman. Kunjungan wisman pada Desember 2013 tumbuh 12,22 persen dibandingkan Desember 2012 hanyalah berjumlah 766.966 wisman. Sementara berdasarkan kebangsaan, kunjungan wisman pada Desember 2013 dibandingkan Desember 2012 yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu: Arab Saudi sebesar (39,37 persen), Bahrain (36,11 persen), Uni Emirat

Arab (35,59 persen), Mesir (25,93 persen), dan Hongkong (23,42 persen) (Badan Pusat Statistik, 2015).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain: berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, untuk tujuan tersebut Pemerintah Daerah harus memiliki kekuatan untuk menggali potensi sumber-sumber PAD dan Pemerintah harus mentransfer sebagai pendapatan dan atau membagi sebagian pendapatan pajaknya dengan Pemerintah Daerah. Dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping pengelolaan terhadap sumber PAD yang sudah ada perlu ditingkatkan dan daerah juga harus selalu kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan potensi sumber-sumber PAD sehingga dengan semakin banyak sumber-sumber PAD yang dimiliki, daerah akan semakin banyak memiliki sumber pendapatan yang akan dipergunakan dalam membangun daerahnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan PAD yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Nirwandar (2006) menegaskan bahwa sektor pariwisata semakin dipersepsikan sebagai mesin ekonomi

penghasil devisa pembangunan. Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Pariwisata juga merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. (Wahab, 2003).

Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun internasional, tingkat hunian hotel, pendapatan perkapita, besar kecilnya pajak hotel dan restoran, dan besar kecilnya retribusi obyek wisata. Tambunan dalam Badrudin (2001), mengemukakan bahwa industri pariwisata yang menjadi sumber PAD adalah industri pariwisata milik masyarakat daerah *Community Tourism Development (CTD)*. Dengan mengembangkan CTD pemerintah daerah dapat memperoleh peluang penerimaan pajak dan beragam retribusi resmi dari kegiatan industri pariwisata yang bersifat multisektoral, yang meliputi hotel, restoran, usaha wisata, usaha perjalanan wisata, profesional convention organizer, pendidikan formal dan informal, pelatihan dan transportasi. Spillane (1987) menjelaskan bahwa peranan pariwisata dalam pembangunan negara pada

garis besarnya berintikan tiga segi, yaitu segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan-wisatawan asing).

Dalam kaitannya dengan keberadaan pariwisata daerah, Propinsi Jawa Barat memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan yang belum banyak dimanfaatkan. Demikian pula ada potensi pembangunan yang telah dimanfaatkan, tetapi belum optimal dikembangkan, antara lain di sektor pertanian, kehutanan, industri, pariwisata dan pertambangan. (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2012). Sektor pariwisata dapat menjadi salah satu sektor pendongkrak ekonomi Jawa Barat yang sedang lesu dan dinilai dapat menjadi pendukung besar bagi pendapatan di Jawa Barat. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, jumlah wisatawan yang mengunjungi Jawa Barat pada tahun 2014 sekitar 45 juta orang dan berpotensi untuk mengalami penambahan jumlah wisatawan di tahun-tahun berikutnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kunjungan wisatawan terkait pariwisata di Jawa Barat masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah wisata lain seperti Bali. Perbaikan infrastruktur dan pengelolaan objek wisata yang baik dapat menjadi salah satu cara menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Jawa Barat. Disamping itu, Walikota Bandung pun sedang mencanangkan program ekonomi kerakyatan berbasis pariwisata untuk menyiapkan masyarakat pariwisata. Dengan terciptanya masyarakat pariwisata diharapkan masyarakat

menjadi lebih terdorong untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Jawa Barat (Fokus Jawa Barat, September 2015).

Sektor industri pariwisata sebagai salah satu sektor yang diandalkan bagi penerimaan daerah maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi pariwisata yang dimiliki sebagai usaha untuk mendapatkan sumber dana melalui terobosan-terobosan baru dalam upaya membiayai pengeluaran daerah melalui retribusi yang didapatkan dari masing-masing obyek pariwisata di tiap daerah. Terobosan dimaksud salah satunya adalah dengan peningkatan kualitas dan obyek-obyek kepariwisataan yang baru di Jawa Barat. Hal ini akan mendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, sehingga akan meningkatkan penerimaan daerah terutama retribusi obyek wisata dan juga akan mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat sekitarnya, sehingga nantinya dapat membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui dampak pariwisata terhadap perekonomian daerah, dan juga sebagai salah satu faktor penentu tingginya tingkat perekonomian daerah adalah melalui berkembangnya pendapatan retribusi objek pariwisata yang diterima daerah tersebut. Pendapatan objek pariwisata ini akan menyumbang ke pendapatan daerah berupa bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba

perusahaan daerah, penerimaan dinas dan pendapatan asli yang sah.

Jawa Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat melalui semakin bertambahnya jumlah obyek wisata di Jawa Barat sampai pada tahun 2013 dan berbagai macam jenis obyek wisata seperti bangunan bersejarah dan masih banyak lagi. Namun potensi yang tinggi tersebut masih kurang dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Retribusi Objek Pariwisata Jawa Barat. Oleh karena itu perlu diadakan studi mengenai analisis pengaruh jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita terhadap pendapatan pendapatan retribusi obyek pariwisata di Jawa Barat agar memperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun pertanyaan penelitian yang akan dibahas adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
- 2) Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
- 3) Bagaimana pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?

### **C. KONTRIBUSI PENELITIAN**

Kontribusi dari penelitian ini diharapkan:

1. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah provinsi Jawa Barat dalam menentukan kebijakan

yang tepat guna meningkatkan pendapatan pemerintah daerah khususnya dari sektor pariwisata sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.

2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang lain.

### **D. KAJIAN PUSTAKA**

#### **1. Konsep Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan peningkatannya. Hasil penelitian yang dilakukan Roerkaerts dan Savat (Spillane, 1987:138) menjelaskan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah: (a) menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat, berupa penginapan, restoran, dan rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan dan penyediaan cinderamata.

Bagi daerah sendiri kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali PAD, sehingga perekonomian daerah dapat ditingkatkan, (b) membuka kesempatan kerja, industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga banyak

membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah tersebut, (c) menambah devisa negara, semakin banyaknya wisatawan yang datang, maka makin banyak devisa yang akan diperoleh, (d) merangsang pertumbuhan kebudayaan asli, serta menunjang gerak pembangunan daerah. Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik (Badrudin, 2001).

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional. (Wahab, 2003).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran rata-rata pendapatan per kapita di suatu wilayah. Pendapatan Perkapita

adalah pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB dibedakan ke dalam beberapa jenis, diantaranya: (1) PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) lebih menunjukkan rata-rata pendapatan per satu orang penduduk secara nominalnya; (2) PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan rata-rata pendapatan per satu orang penduduk secara riil; dan (3) PDRB Atas Dasar Harga Pasar (ADHP) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. (Jawa Barat Dalam Angka, 2014).

## **2. Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata**

Dalam PP No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 dijelaskan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Pendapatan obyek pariwisata adalah merupakan sumber penerimaan obyek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari obyek pariwisata tersebut. Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pajak Daerah atau yang disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembanguna Daerah.

Menurut Munawir (1997) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak akan dikenakan iuran itu. Sementara itu Sproule-Jones dan White (1997) mengatakan bahwa retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan itu. Queen (1998:2) lebih menekankan bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian progam bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bagian yang mudah dalam

menyusun retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif. Bagian tersulit adalah menyakinkan masyarakat (publik) tanpa diluar kesadaran mereka tarif tetap harus diberlakukan.

Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah letak pada timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dari penerima retribusi kepada penerima retribusi. Definisi retribusi daerah menurut PP Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan disediakan pemerintah pada masyarakat berpangkal pada efisiensi ekonomis.

### **3. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah**

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas: (a) pendapatan asli daerah, yaitu: (i) hasil pajak daerah, (ii) hasil retribusi daerah, (iii) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (iv) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (b) dana perimbangan (c) pinjaman daerah; dan (d) lain-lain pendapatan daerah yang asli. Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya

sangat ditentukan atau tergantung dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menghidupi dirinya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki, untuk itu usaha untuk mendapatkan sumber dana yang tepat merupakan suatu keharusan. Terobosan-terobosan baru dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah harus dilakukan, salah satunya adalah sektor pariwisata.

Pendapatan sektor pariwisata adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang berasal dari kegiatan pariwisata seperti retribusi rekreasi, hotel, restoran dan yang lainnya dengan satuan rupiah (Yoeti, 1996). Beberapa atau sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penerimaan retribusi karena masih mendapat dana dari pemerintahan pusat. Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan sektor pariwisata adalah pendapatan yang diperoleh daerah melalui kegiatan pariwisata yang dihitung melalui satuan rupiah.

#### **4. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk umumnya sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi.

Atau definisi pertumbuhan ekonomi yang lainnya adalah bertambahnya pendapatan nasional dalam periode tertentu misalnya dalam satu tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi

menunjukkan peningkatan dari kapasitas produksi maupun jasa dalam kurun waktu tertentu.

Beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya: (1) faktor sumber daya manusia (SDM); (2) faktor sumber daya alam (SDA); (3) faktor Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); (4) faktor budaya; dan (5) sumber daya modal.

## **E. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Disain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yakni suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka-angka yang di nilai dan dianalisis dengan analisis statistik. Karena penelitian ini bertolak dari suatu teori yang kemudian diteliti, memunculkan data terkait, kemudian dibahas dan setelah itu diambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, baik dari literatur, studi pustaka, atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dalam penelitian ini.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata Jawa Barat dan literatur-literatur lainnya seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal ekonomi. Data yang digunakan antara lain adalah jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, PDRB per kapita, dan pendapatan retribusi

objek wisata di Jawa Barat tahun 2009-2013. Selain itu data yang digunakan adalah data kurun waktu (*time series*) dari tahun 2009-2013 dan data deret lintang (*cross-section*) sebanyak 26 kabupaten/kota di Jawa Barat yang menghasilkan 130 observasi.

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan realistis. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode studi pustaka, yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, buku referensi, maupun jurnal-jurnal ekonomi.

Data yang digunakan adalah data time series adalah data runtut waktu (*time series*) yang merupakan data yang dikumpulkan, dicatat atau diobservasi sepanjang waktu secara beruntutan dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

### 4. Teknik Analisis

Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara data *time series* dan data *cross-section*. Dalam model panel data, persamaan model dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

dimana N adalah banyaknya data *cross-section*

Sedangkan persamaan model *time series* adalah:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t ; t = 1, 2, \dots, t$$

dimana t adalah banyaknya data *time series*

Oleh karena data panel merupakan gabungan dari *time series* dan *cross-section*, maka persamaanya menjadi:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it} ; i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, t$$

dimana N adalah banyaknya observasi; t banyaknya waktu; dan NxT banyaknya panel

Analisis regresi berganda dengan menggunakan data panel dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menyusun Data Panel
- b. Estimasi (Membuat Persamaan) Regresi Data Panel, yang terdiri atas: (1) Model *common effects*; (2) Model *Fixed Effect*; (3) Model *Random Effects*; dan (4) Model *fixed effects*.
- c. Pemilihan Model. Dari ketiga model yang telah di-estimasi akan dipilih model mana yang paling tepat/sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (*test*) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) berdasarkan karakteristik data yang dimiliki, yaitu: *F Test (Chow Test)*, *Hausman Test* dan *Langrange Multiplier (LM) Test*.

Untuk memilih model yang tepat dari ketiga teknik analisis tersebut, maka perlu dilakukan F Test yang membandingkan antara model *common effect* dengan *fixed effect model* sedangkan untuk memilih antara *fixed effect model* dengan *random effect model* dapat dilihat dengan membandingkan antara jumlah waktu penelitian (T) dengan jumlah individu (N) (Nachrowi dan Usman, 2006:318).



## F. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa nilai F Test sebesar 3,64272 dengan probabilitas sebesar 0,0009 atau lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  sehingga kita menolak  $H_0$  dan menyimpulkan fixed effect model sebagai teknik analisis yang lebih sesuai. Hasil F test disajikan secara lengkap dalam tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pengujian CE dengan FE melalui F Test

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: TESIS			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statisti	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.64272	(11,46)	0.0009

Sumber: Data Olahan Eviews 6

Hasil model analisis data ini telah lolos melalui uji asumsi klasik standar yang sudah umum dilakukan dalam pemodelan ekonomi. Penggunaan hipotesis menggunakan data panel bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta kemampuan model dalam menjelaskan nilai pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pengujian dikelompokkan menjadi pengujian secara simultan dan parsial. Ringkasan hasil pengujian dapat dilihat dari tabel 1.

Tabel 6. Hasil Uji Fix Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	P
C	5.770101	0.27350	21.0971	0.000
MODAL?	-0.008076	0.00231	-3.5008	0.001
PAD?	0.031059	0.00864	3.5947	0.001
R-squared	0.554884			
Adjusted R-squared	0.429090			
F-statistic	4.411058			
Prob (F)	0.000086			

Sumber: Data Olahan Eviews 6

Dari tabel 1 diperoleh hasil estimasi model yang dapat ditulis dalam persamaan regresi linier berganda di bawah ini:

$$Y = 5,770 - 0,008X_{1t-1} + 0,031 X_{2t-1}$$

Model persamaan regresi linier berganda tersebut dapat diartikan:

1. Nilai konstanta sebesar 5,770 artinya apabila nilai variabel belanja modal tahun sebelumnya dan pendapatan asli daerah (PAD) tahun sebelumnya bernilai nol, maka pertumbuhan ekonomi naik sebesar 5,770 persen.
2. Variabel belanja modal pada tahun sebelumnya memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien berpengaruh sebesar - 0,008 artinya setiap penambahan 1 milyar belanja modal sedangkan nilai variabel lain tetap (*ceteris paribus*) maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,008 persen.

Variabel pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun sebelumnya memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien berpengaruh 0,031 artinya setiap penambahan 1 milyar pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan nilai variabel lain tetap (*ceteris paribus*) maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,031 persen.

Dari hasil pengolahan data yang terlihat pada tabel 1 diperoleh probabilitas sebesar 0,000086 yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,00001 < 0,05$ ) maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu belanja modal dan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan secara simultan

terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.

Pengujian Hipotesis<sub>2</sub> yaitu belanja modal pada tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari tabel 1, terlihat bahwa probabilitas belanja modal sebesar 0,0010 lebih kecil dari 0,05 ( $0,0010 < 0,05$ ) maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa belanja modal pada tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengujian Hipotesis<sub>3</sub> yaitu pendapatan asli daerah pada tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari Tabel 6, terlihat bahwa probabilitas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,0008 lebih kecil dari 0,05 ( $0,0008 < 0,05$ ) maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel 1 didapatkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,554884. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal dan pendapatan asli daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar 55,49 persen dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat sedangkan sisanya sebesar 44,51 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

## G. DAFTAR RUJUKAN

- Austriana, Ida. 2005, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata*. Disertasi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Badrudin. 2001. *Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Pembangunan Industri Pariwisata*. Kompak. Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Darmadjati, RS. 2006, *Istilah-Istilah Dunia Pariwisata*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Hanggara. 2009. *Tingkat Hunian Hotel* ([http://vickyhanggara.blog.friendster.com/2009/Pengertian-Tingkat Hunian/](http://vickyhanggara.blog.friendster.com/2009/Pengertian-Tingkat-Hunian/)), diakses 1 September 2015
- Lundberg, E Donald., Stavenga, Mink H., dan Krishnamoorthy, M. 1997. *Ekonomi Pariwisata*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. BPFE, Yogyakarta. Munawir, S. 1997. *Perpajakan, Liberty, Edisi Kelima Cetakan Kedua*. Yogyakarta.
- Munawir, S. 1997. *Perpajakan, Liberty, Edisi Kelima Cetakan Kedua*. Yogyakarta
- Nirwandar Sapta; 2006. *Peran Pariwisata dalam mendukung Perekonomian Rakyat*. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- Pendit, S Nyoman. 1994. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Pleanggara, 2012. *Analisis pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Vol.1.No.1 Universitas Diponegoro. Semarang
- Qadarrocman. 2010. *Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata di Kota Semarang dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Semarang.
- Satrio, Dicky. 2002, *Perkembangan Pendapatan Pemerintah Daerah dari Sektor Pariwisata, di Kabupaten Blora*

- dan Faktor Yang Mempengaruhi*". Disertasi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Soekadijo, R.G, 2001. *Anatomi Pariwisata*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sproule, Jones & White.1997. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (terjemahan oleh Masri Maris), Universitas Indonesia Press. Jakarta
- Spillane*, James J. 1987. *Pariwisata Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wahab*, Salah. 2003. *Industri Pariwisata Dan Peluang Kesempatan Kerja*, PT. Pertja Jakarta
- Winarno, Wing Wahyu. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yoeti, Oka A. 2008. *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: Kompas.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Citra Umbara, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Primbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Citra Umbara, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Deputi Bidang Ekonomi. 2014. *Pembangunan Pariwisata 2015-2019*
- Kemenenterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2013. *Neraca Satelit Pariwisata Nasional (NERPARNAS) 2013*.
- Badan Pusat Statisti (BPS), 2015. *Pendapatan Nasional Indonesia 2010-2014*.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2014.
- Fokus Jawa Barat, 2015. <http://fokusjabar.com/2015/05/02/bidik-15-juta-wisman-jabar-upayakan-masyarakat-pariwisata/>